

FENOMENA, FEMINISME DAN POLITICAL SELF SELECTION BAGI PEREMPUAN

Phenomenon, Feminism and Political Self Selection for Women

Nurwani Idris

Dosen Fakultas Sosial dan Politik Universitas Jayabaya

ABSTRACT

Democracy needs all participation people in the country, women and men. The political right for women, as we know was feminism hard and long time struggled, therefore now the women have the high quality live in politic, the economic and social. All the country in the world have ratified the PBB of law for political freedom for women as the same as men.

Especially in Indonesia now there's no formal barriers for women leadership, if they select to participate in politics but it was the phenomenon for the women among self selection in politics, the freedom to be participating and children, husband, housing, that still stronger; from which one barrier "self selection" or "culture and religion" responsibility where significantly.

Minangkabau women, forward analysis we can aim self selection or children, husband and family responsibility. It is indisputable that the women's awareness and struggle in the politics are debt to the feminists' endless efforts. The feminists have fostered the women to empower themselves by which they reach equal position compared with their counterparts, in nearly all aspects of the social life.

Keywords: phenomenon, feminism, and political self selection.

PENDAHULUAN

Keberhasilan perjuangan feminisme serta tuntutan demokrasi agar semua warga negara berpartisipasi aktif dalam politik, dalam penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik (*good government*) mengharuskan keikutsertaan perempuan dalam segala bidang termasuk politik, dengan kata lain perempuan diharapkan ambil bagian dalam pengambilan keputusan (*compete*). Istilah kompetensi politik perempuan dalam beberapa tahun belakangan ini menjadi perbincangan yang menarik dalam bidang kajian birokrasi pemerintahan, dalam pendidikan, dan perusahaan.

Istilah "kompetensi" berasal dari kata *compete*, yang berarti ikut ambil bagian dalam balapan, kontes atau ujian. Selanjutnya, *competence* berarti memiliki

kemampuan dalam pekerjaan tertentu, pendapatan yang cukup bagi seseorang untuk hidup dalam kesenangan, serta memiliki *legal capacity* dalam hukum dan akademik; dan *competent* yang apabila diatributkan pada orang dianggap memiliki kemampuan (*ability*), kekuatan (*power*), otoritas (*authority*), kemampuan (*skill*), dan pengetahuan (*knowledge*) (*The Advanced Learner's Dictionary of Current English*). Sementara itu Echols dan Shadily dalam Kamus Bahasa Inggris-Indonesia mendefinisikan kata *competency* sama dengan *competence* yakni kecakapan, kemampuan dan wewenang (Matullesy, 2005).

Kewenangan perempuan atau kompetensi perempuan dalam politik, sebenarnya sudah lama disadari di banyak negara di dunia, termasuk di Indonesia. Pemerintah Indonesia sampai saat ini

sudah memberikan kewenangan yang luas kepada perempuan dengan dikeluarkannya peraturan dan undang-undang. Dengan berbagai alasan perempuan harus diberi hak-hak, kewajiban, dan kewenangan dalam politik.

Cendekiawan Sue Thomas melontarkan lima alasan mengapa perempuan perlu meningkatkan partisipasinya dalam politik atau untuk meningkatkan proporsi keterwakilannya dalam jabatan politik (Thomas dan Wilcox 1998, dalam Bennion, 2001). *Pertama*, kesempatan yang sama bagi kedua jenis kelamin, laki-laki dan perempuan, untuk memangku jabatan politik bisa meningkatkan legitimasi pemerintahan demokratis yang mengklaim mewakili semua warga negaranya.

Ke dua, warga negara percaya bahwa semua warganegara mempunyai kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik. Jika hal ini dapat diwujudkan, maka tingkat kepercayaan dan dukungan terhadap pemerintah akan meningkat, dan hal ini bisa membantu menciptakan pemerintahan yang lebih stabil.

Ke tiga, perempuan merupakan kelompok talenta yang besar. Kemampuan, titik pandang, dan ide-ide mereka dapat menguntungkan masyarakat dengan melibatkan pemegang jabatan laki-laki dan perempuan sekaligus.

Ke empat, pemerintahan yang merangkul pemimpin laki-laki dan perempuan menyampaikan pesan kepada kaum muda laki-laki dan perempuan, juga warganegara dewasa dari semua kelompok umur, bahwa dunia politik terbuka bagi semua orang dan semua golongan, tidak hanya sebagai wilayah eksklusif laki-laki. Alasan ini didasarkan pada legitimasi, stabilitas, dan pemanfaatan sumberdaya.

Ke lima, alasan mengenai pentingnya untuk memasukkan perempuan dalam jajaran pemimpin politik dilandasi oleh fakta bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai pengalaman hidup berbeda. Dengan adanya perbedaan ini, laki-laki dan perempuan bisa saling mengisi dan

menyempurnakan peran masing-masing. Secara khusus, pembagian tugas berdasar jender yang berkelanjutan di tempat kerja maupun di rumah dapat berubah menjadi cara tersendiri untuk memandang usulan legislasi dan agenda politik berbeda, karena jiwa pengabdian, pemeliharaan, dan relijiulitas yang mereka punyai, diharapkan akan memberikan cara yang berbeda dalam kepemimpinan.

Sehubungan dengan itu, Christine de Pizan mengemukakan konsep keluhuran dan harmoni mengenai perempuan, bahwa: perempuan adalah dewi yang bermahkotakan keluhuran-keluhuran berupa akal, ketulusan dan keadilan; dan de Pizan menganjurkan agar perempuan ikut membela negara dengan keluhuran, ilmu pengetahuan (pendidikan) agar dapat membela kebenaran (de Pizan, 1405 dalam Losco, 2005).

Keikutsertaan perempuan juga penting karena alasan keadilan, legitimasi, stabilitas, dan simbolisme politik. Para aktivis politik dan politisi yang berjuang meningkatkan jumlah pemegang jabatan perempuan, seringkali mengemukakan bahwa perempuan akan membuat perbedaan dalam politik bahwa mereka akan mewakili perspektif, kebutuhan, dan kepentingan warganegara perempuan.

Selanjutnya Virginia Sapiro yang menjelaskan pendapat Wollstonecraft dalam *A Vindication of the Rights of Women*, percaya bahwa keibuan adalah salah satu tugas terpenting kaum perempuan, meskipun dengan berjalannya waktu ia tampaknya lebih yakin bahwa tugas-tugas domestik bukanlah tanggung jawab tunggal kaum perempuan. Itu adalah tanggung jawab bersama dengan kaum laki-laki, dan kaum perempuan tidak dapat dibatasi hanya pada tugas-tugas domestik. Namun, ia dengan kuat menegaskan di seluruh tulisannya bahwa karakter perempuan yang ditanamkan oleh keadaan masyarakat sekarang sepenuhnya tidak memadai bagi pemenuhan keibuan yang luhur. Sebagai salah satu tugas terpenting dalam kehidupan, pembesaran anak memerlukan kekuatan tubuh dan

pikiran yang selama ini disangkal keberadaannya pada kaum perempuan. Kaum perempuan tidak akan mampu menghasilkan anak-anak dan warga negara yang baik seandainya mereka sendiri tidak dididik untuk menjadi orang-orang dewasa dan warga-warga negara yang luhur (Sapiro, dalam Losco, 2005).

Selanjutnya dengan dideklarasikannya "Tahun Perempuan" 1992 oleh PBB, hal ini juga meningkatkan perhatian warganegara, politisi, dan akademisi terhadap peran perempuan dalam politik, khususnya peran mereka sebagai pemegang jabatan politik. Pada masa ini di Indonesia, masyarakat telah mulai menyetujui dan berharap akan partisipasi perempuan yang lebih besar, walaupun bagi perempuan masih banyak hambatan yang harus dilalui dan diatasi. Disamping memang tidak mudah bagi perempuan untuk memasuki dunia politik, walaupun tidak ada lagi aturan-aturan formal yang menghalangi namun juga merupakan pilihan (*self selection*) yang sulit.

Pilihan inilah yang menjadi fenomena yang juga berat saat ini bagi perempuan untuk memilih karier politik dan mengorbankan keluarga seperti dikatakan oleh Wilson Nadiale (2002, 2004) dalam bukunya "Lembutnya Hati Ibu" mengungkapkan dalam Maria Etty bahwa perempuan yang akan berkarier harus siap sepenuhnya menanggung segala resiko profesionalisme. Mereka harus siap mengorbankan waktu, perasaan, kesempatan-kesempatan yang seharusnya diberikan kepada keluarganya. Perempuan harus merelakan ini semua demi karir politik. Hal ini jelas merupakan tugas yang berat dan sulit.

Perjuangan Feminisme dan Politik

Para aktivis politik telah lama mengungkapkan hubungan antara kehadiran pemegang jabatan perempuan dan sifat agenda politik. Sebuah lengan gerakan feminis yang penting telah mengkampanyekan pemegang jabatan perempuan selama beberapa dekade seperti *National Women's Political Caucus*

(NWPC), didirikan tahun 1971, dan *Women's Campaign Fund* (WCF), didirikan tahun 1974, bekerja meningkatkan jumlah perempuan pro pemilihan dalam jabatan yang dipilih dan ditunjuk tanpa memandang afiliasi partainya. Kedua kelompok ini percaya bahwa pemimpin perempuan akan meningkatkan perhatian publik dan memberikan solusi inovatif atas banyak masalah sosial yang meliputi kemiskinan, kualitas hidup, pemeliharaan anak berkualitas dan perawatan kesehatan, upah setara, perumahan terjangkau, kesejahteraan ibu dan anak. (Beck, 1997 dalam Bennion, 2001).

Beberapa pengamat berkesimpulan bahwa kehadiran perempuan sebenarnya sangat dibutuhkan dalam politik untuk menjamin suara, kepentingan dan prioritas perempuan tersebut agar terwakili dalam pemerintahan dan dalam undang-undang yang diberlakukan oleh pemerintah. Banyak aktivis politik dan warganegara yang terlibat dalam politik tampaknya setuju. WPC dan NWPC telah dirangkul oleh beberapa komite aksi politik lebih baru yang berkomitmen memilih lebih banyak perempuan untuk jabatan politik. (Bennion, 2001)

Banyak pengamat politik, menyatakan akhir abad ke-20 dan awal abad ke-21 ditandai oleh "feminisasi politik." Apa yang disebut feminisasi politik mengacu pada prioritas yang telah diberikan para politisi pada isu-isu yang dianggap penting oleh perempuan dan pada gaya kampanye lebih personal yang didisain untuk menarik dukungan pemilih perempuan. Isu-isu seperti jaminan sosial, medicare, dan pendidikan adalah isu-isu yang diberi prioritas lebih tinggi oleh pemilih perempuan daripada oleh laki-laki. Feminisasi politik bertujuan mewujudkan kebijakan-kebijakan yang melindungi kaum perempuan; kaum miskin, meredakan konflik antara keluarga dan kerja; dan menyediakan dukungan jaringan pengaman bagi mereka yang tertimpa bencana; yang menghadapi kesulitan

ekonomi dan di bawah garis kemiskinan. (Edsall, 1999 dalam Bennion, 2001).

Namun, perempuan yang ingin masuk dalam dunia politik, menemukan kenyataan bahwa lingkungan politik, publik, budaya dan sosial sering tidak bersahabat atau bahkan bermusuhan dengan mereka. Bahkan secara sepintas, komposisi pengambil keputusan politik sekarang di berbagai wilayah memberikan bukti bahwa perempuan tetap menghadapi sejumlah hambatan dalam mengartikulasikan serta menentukan kepentingannya. Perempuan di seluruh dunia pada setiap tingkat sosio-politik merasa dirinya kurang terwakili dalam parlemen dan jauh dari keterlibatan dalam pengambilan keputusan. Sementara arena permainan politik di setiap negara mempunyai karakter tersendiri, ada sebuah gambaran umum yang tetap bagi semua: yakni bahwa hal itu tidak seimbang dan tidak kondusif bagi keikutsertaan perempuan.

Hambatan dan situasi politik memiliki variasi di setiap negara, mayoritas lembaga-lembaga yang memerintah didominasi oleh laki-laki yang mengutamakan kepentingan-kepentingan mereka sendiri. Lembaga-lembaga politik pemerintah yang didominasi laki-laki tidak mempromosikan perempuan atau isu-isu perempuan. Jadi tetap penting sekali untuk menekankan bahwa perempuan sendiri harus mengorganisir dan memobilisasi jaringan kerjanya, belajar mengkomunikasikan kepentingan-kepentingan mereka dengan organisasi-organisasi yang berbeda, dan mendorong mekanisme untuk meningkatkan representasi diri mereka sendiri. (International IDEA, 2002).

Fenomena Perempuan dalam Politik dan Perjuangan Feminisme

Perlu diingat bahwa studi tentang perempuan yang akhirnya menjadi fenomena perempuan dalam politik, pada dasarnya merupakan sebuah produk dari perjalanan panjang gerakan feminisme di negara-negara Barat, khusus di Amerika Serikat. Studi tentang perempuan menjadi semakin penting akibat munculnya tiga

gelombang gerakan feminisme, yang mendapatkan kebebasannya dalam segala bidang termasuk politik.

a. Feminisme Gelombang Pertama: Penghapusan Diskriminasi

Feminisme gelombang pertama berkembang pada abad ke-19 dan awal abad ke-20. Pada masa ini terdapat tiga aliran feminisme dengan perspektif: (1) feminisme liberal berusaha memperjuangkan perombakan legislatif untuk mendapatkan hak-hak pendidikan, hak milik, pengaturan jarak kelahiran, perceraian, pekerjaan dan hak pilih (*suffrage*); (2) feminisme utopia menuntut pemerataan pekerjaan dan pendapatan (*equal employment and income*); (3) feminisme marxis menuntut partisipasi penuh perempuan dalam produksi dan berakhirnya penindasan perempuan; (4) feminisme psikoanalisis dan jender, berdasarkan pandangan Freud, percaya bahwa penjelasan fundamental atas cara bertindak perempuan berakar dalam psike perempuan, terutama dalam cara pikir perempuan. Berdasarkan konsep Freud, seperti tahapan Oedipal dan kompleks Oedipus, mereka mengklaim bahwa ketidaksetaraan jender berakar dari rangkaian pengalaman pada masa kanak-kanak awal mereka, yang mengakibatkan dirinya sebagai feminin, melainkan juga cara masyarakat memandang bahwa maskulinitas adalah lebih baik daripada femininitas; (5) feminisme radikal kultural yang dipelopori oleh Marilyn French, mengatribusikan perbedaan laki-laki dan perempuan lebih kepada biologi (*nature/alam*), daripada kepada sosialisasi (*nurture/pengasuhan*); (6) feminisme eksistensial yang dipelopori oleh Simon de Beauvoir dalam bukunya *Second Sex* (Tong, 1998).

Dari sekian banyak teori feminis dalam studi ini dipakai konsep alienasi Marilyn French dan Simon de Beauvoir sebagai konsep dasar dari tersisihnya perempuan dari ranah publik, dan bagaimana cara mereka memasuki ranah

publik tersebut, dengan kata lain usaha mereka untuk keluar dari ranah domestik.

Sesungguhnya di dalam buku Marilyn French yang berjudul *Beyond Power*, setelah meneliti asal-muasal patriarki, French menyimpulkan bahwa manusia awal hidup dalam harmoni dengan alam. Mereka memandang diri mereka sebagai bagian kecil dari keseluruhan yang lebih besar, dan manusia harus menyesuaikan diri dengan itu jika mereka ingin hidup. Berdasarkan bukti dari primata dan sisa-sisa peninggalan “masyarakat sederhana”, French berspekulasi bahwa masyarakat manusia awal, mungkin berbentuk matrissenris (berpusat pada ibu), karena ibu yang lebih mungkin untuk memainkan peran utama di dalam kegiatan keterikatan, berbagi, dan partisipasi harmoni di dalam alam, yang kesemuanya berorientasi kepada kelangsungan hidup. French juga berspekulasi bahwa sejalan dengan pertumbuhan populasi manusia, makanan menjadi langka. Manusia kemudian membuat sumur, menggali, dan membajak alam untuk memperoleh kekayaan yang disembunyikan-nya. Semakin besar kendali yang didapat manusia atas alam, semakin terpisah manusia dari diri manusia itu sendiri (French, 1985 dalam Tong, 1998).

Alienasi, sebagaimana didefinisikan oleh French, sebagai rasa terpisah yang dalam, yang menimbulkan “kebencian”, yang pada gilirannya menimbulkan “ketakutan” dan akhirnya “permusuhan.” Tidaklah mengherankan, karena itu, bahwa perasaan negatif ini mengintensifkan hasrat laki-laki untuk menguasai, bukan saja alam, tetapi juga perempuan, yang mereka asosiasikan dengan alam, terutama karena peran perempuan di dalam reproduksi (French, 1985 dalam Tong, 1998).

French selanjutnya mengatakan: jika kita ingin melihat abad 21, kita harus menghargai “cinta dan kelembutan, serta kemauan untuk saling berbagi, dan saling menjaga setara dengan kendali dan struktur, rasa memiliki dan status.” Jika kita ingin menerima penegasan ini sebagai mana adanya saja, kita akan dapat dengan mudah menyimpulkan bahwa, bagi French,

masyarakat yang terbaik adalah masyarakat yang androgin, yang setiap individu laki-laki dan perempuan didalamnya dapat merangkul nilai-nilai yang secara historis adalah feminin, seperti cinta, kelembutan, kemauan saling berbagi, dan saling menjaga, seantusias mereka merangkul nilai-nilai ketegasan, struktur, rasa memiliki, dan status yang secara historis adalah maskulin (French, 1985 dalam Tong, 1998). Namun Beauvoir dalam feminisme eksistensialisme untuk perempuan dalam “*Second Sex*” mengatakan bahwa perempuan teropresi seperti diulas oleh Tong (1998); dengan mengadopsi bahasa ontologis dan bahasa etis eksistensialisme, Beauvoir mengemukakan bahwa laki-laki dinamai “laki-laki” sang *Diri*, sedangkan “perempuan” sang *Liyan*. Jika *Liyan* adalah ancaman bagi *Diri*, maka perempuan adalah ancaman bagi laki-laki. Karena itu, jika laki-laki ingin tetap bebas, ia harus mensubordinasi perempuan terhadap dirinya.

Beauvoir mengatakan perempuan di Eropa sangat tersubordinasi, terkekang oleh hukum dan sosial, perempuan teropresi, mereka adalah makhluk kelas dua, perempuan adalah *liyan* (*the others* — yang lain). Perempuan tidak hanya berbeda dan terpisah dari laki-laki, juga inferior terhadap laki-laki (de Beauvoir, 1952 dalam Tong, 1998:262). Selanjutnya Beauvoir mengamati peran sebagai istri membatasi kebebasan perempuan. Meskipun Beauvoir percaya bahwa perempuan dan laki-laki mempunyai kemampuan untuk memiliki rasa cinta yang mendalam, ia menyatakan bahwa lembaga perkawinan merusak hubungan suatu pasangan. Perkawinan mentransformasi perasaan yang tadinya dimiliki, yang diberikan secara tulus, menjadi kewajiban dan hak yang diperoleh dengan cara yang menyakitkan. Perkawinan merupakan bentuk perbudakan, menurut de Beauvoir. Perkawinan memberikan perempuan (paling tidak perempuan borjuis Perancis) sedikit lebih dari “kehidupan sehari-hari

yang disamakan, sehingga tampak lebih baik dari yang sesungguhnya, yaitu kehidupan yang tidak berambisi dan tidak mengandung hasrat, hari-hari tak bertujuan yang terus-menerus diulangi tanpa batas, hidup yang berlalu dengan perlahan menuju kematian tanpa mempertanyakan tujuannya.” Perkawinan menawarkan perempuan kenyamanan, ketenangan, dan keamanan, tetapi perkawinan juga merampok perempuan atas kesempatan untuk menjadi hebat. Sebagai imbalan atas kebebasannya perempuan diberikan “kebahagiaan.” Perlahan, perempuan belajar untuk menerima kurang dari yang sesungguhnya berhak diperolehnya (de Beauvoir, 1952, 2003).

Jika peran sebagai istri membatasi pengembangan diri perempuan, peran sebagai ibu lebih membatasi lagi. Meskipun Beauvoir mengakui bahwa *mengasuh dan membesarkan* anak hingga dewasa dapat bersifat mengikat eksistensi seorang perempuan, ia bersikeras bahwa *melahirkan* bukanlah tindakan, melainkan semata-mata suatu peristiwa. Beauvoir menekankan bahwa kehamilan mengalienasi perempuan dari dirinya sendiri, dan hal itu menyulitkan perempuan dalam menentukan arah takdirnya tanpa terganggu. Seperti feminis radikal-libertarian, Shulamith Firestone, Beauvoir mempertanyakan kenikmatan yang “seharusnya” dari kehamilan, dan mengatakan bahwa bahkan perempuan yang menginginkan anak tampaknya mengalami masa-masa yang sulit selama kehamilan. Juga seperti Firestone, Beauvoir khawatir dengan hubungan ibu-anak yang sangat mudah terdistorsi. Mula-mula anak tampaknya membebaskan perempuan dari status objeknya karena ia “mendapatkan dari anaknya apa yang dicari laki-laki dan perempuan; seorang *Liyan*, paduan alam dan nalar, yang akan menjadi mangsa dan juga menjadi *ganda*.” Sejalan dengan waktu, anak itu menjadi tiran yang banyak menuntut—balita, remaja, dewasa, seorang subjek yang sadar, yang dengan melihat ibunya, dapat

membuat ibunya menjadi objek, menjadi mesin untuk mencuci, membersihkan, merawat, dan terutama untuk berkorban. Direduksi sebagai objek, sang ibu, tentu saja, mulai memandang dan memanfaatkan anaknya sebagai objek, sebagai sesuatu yang dapat mengkompensasi rasa frustrasinya yang dalam (de Beauvoir, 1952, 2003).

Sangatlah jelas bahwa menjadi istri dan menjadi ibu, dalam pandangan de Beauvoir seperti diulas oleh Tong (1998), adalah dua peran feminin yang membatasi kebebasan perempuan, tetapi hal yang sama juga berlaku bagi peran perempuan pekerja. Beauvoir menekankan bahwa perempuan pekerja sama halnya dengan istri dan ibu, tidak dapat melepaskan diri dari batasan femininitas. Lebih dari itu, dalam beberapa hal, perempuan pekerja bahkan berada dalam kondisi yang lebih buruk dibandingkan perempuan istri dan ibu yang tinggal di rumah (yang tidak bekerja di sektor publik), karena perempuan pekerja, secara terus-menerus, di manapun juga diharuskan untuk menjadi dan bersikap sebagai perempuan. Dengan perkataan lain, disamping tugas-tugas profesionalnya, seorang pekerja diharuskan untuk melakukan pekerjaan yang diimplikasikan oleh “feminitasnya”, yang bagi masyarakat berarti kewajiban untuk berpenampilan yang menyenangkan. Sebagai akibatnya, perempuan mengembangkan konflik internal antara kewajiban profesional dan kepentingan femininnya. Jika seorang perempuan pekerja mengabdikan dirinya kepada kepentingan profesionalnya, sehingga ia mengabaikan penampilannya, ia akan menghadapi kenyataan bahwa ia tidak lagi memenuhi standar yang dibangun oleh para perempuan cantik. Ia kemudian akan menemukan kesalahan-kesalahan dari rambutnya, giginya, kukunya, kulitnya, bentuk tubuhnya, dan pakaiannya. Karena panik akan berkurangnya kecantikannya, perempuan kemudian akan memotong waktu kerjanya agar mempunyai waktu lebih banyak untuk merawat kecantikannya. Jika ia mengatur ulang

waktunya dengan cara ini, perempuan pekerja kemudian akan menghadapi kenyataan bahwa ia hanyalah pekerja lapis kedua setelah laki-laki, yang tidak seperti perempuan, tidak dituntut untuk membangun narsisme sebagai suatu karakteristik yang diinginkan (de Beauvoir, 1952, 2003).

Beberapa teoretikus feminis tidak sependapat dengan Beauvoir yang cenderung memandang buku tersebut sebagai sebuah studi sosiologi usang. Penelitian baru telah mengungkapkan kenyataan fakta-fakta empiris kehidupan kaum perempuan yang tidak terbayangkan di masa Beauvoir. Penelitian ini menunjukkan bahwa realitas kehidupan tersebut jauh lebih bervariasi daripada yang disarankan Beauvoir. Senada dengan itu, antropolog budaya Judith Okely membantah sejumlah klaim Beauvoir menyangkut budaya non-Barat yang sangat menghargai lembaga perkawinan yang mengharuskan menghormati suami dan tidak menganggap hal itu sebagai subordinasi laki-laki terhadap perempuan.

Selanjutnya Jean Bethke Elshtain (1981 dalam Tong, 1998) menyalahkan pemikiran Beauvoir dalam *The Second Sex* untuk tiga alasan. Ia mencatat, pertama, bahwa buku ini tidak dapat diakses oleh mayoritas perempuan. “Imanensi” dan “transendensi”, “esensi”, dan “eksistensi”, “Ada bagi Dirinya sendiri” dan “Ada pada dirinya sendiri” adalah ide yang tidak muncul langsung dari pengalaman hidup perempuan, tetapi merupakan abstraksi yang muncul dari spekulasi sang filsuf ketika duduk di kursi goyang. Pilihan kata de Beauvoir, menurut Elshtain, akan mengarahkan perempuan yang tidak mendapat pendidikan formal tinggi untuk menyetujui pemikirannya daripada meyakinkan mereka bahwa perempuan sesungguhnya memang “warga kelas dua”.

Elshtain juga dengan keras menolak pendapat Beauvoir tentang tubuh, terutama tubuh perempuan. Ia menyatakan bahwa Beauvoir menampilkan semua tubuh, terutama tubuh perempuan sebagai negatif: merugi, tidak penting, kotor, memalukan,

membebani, dan secara inheren mengalienasi (diri). Elshtain berspekulasi bahwa ketidakpercayaan Beauvoir secara umum terhadap tubuh berakar dari kecemasan eksistensialnya tentang ketubuhan dan kematian tubuh. Tubuh adalah suatu masalah dalam kerangka pikir eksistensial, sepanjang tubuh dipandang sebagai objek yang tidak dapat dikuasai dan tidak dapat dihindari yang membatasi kebebasan setiap subjek berkesadaran. Beauvoir mencatat dalam memoirnya perjuangannya sendiri melawan tubuh: hasrat berahinya yang tertekan, usahanya untuk hidup tanpa tidur, rasa ketakutannya ketika ia semakin menua. Karena disintegrasi yang lambat dari tubuh menandai datangnya kematian—akhir dari kesadaran, dari kebebasan, dari subjektivitas — seorang eksistensial seperti Beauvoir mempunyai keinginan yang sangat kecil untuk merayakan tubuh yang merepresentasikan kekuatan kematian padanya.

Ketidakpercayaan Beauvoir secara umum terhadap tubuh, menurut Elshtain, menjadi ketidakpercayaan secara khusus kepada tubuh *perempuan*. Menurut Beauvoir, kapasitas reproduksi perempuan telah merampok perempuan dari kemanusiaannya. Sebaliknya, kapasitas reproduksi laki-laki tidak mengancam kemanusiaan laki-laki. Setelah hubungan seksual, laki-laki tetap orang yang sama sebelum hubungan seksual. Tetapi jika terjadi fertilisasi setelah hubungan seksual, perempuan berubah dan menjadi bukan orang yang sama ketika hubungan itu terjadi: “terjebak dalam hukum alam, perempuan hamil adalah tumbuhan dan binatang, setumpuk koloid, sebuah inkubator, sebuah telur, perempuan hamil menakutkan bagi anak-anak yang bangga dengan tubuh muda dan lurus, dan membuat orang muda tertawa sinis, karena ia adalah manusia, seorang subjek yang berkesadaran dan individu yang bebas, yang telah berubah menjadi alat untuk melanjutkan kehidupan.” Dengan memfokuskan pada bagian ini dan bagian-

bagian lain yang serupa, Elshtain mengomentari bahwa gambaran Beauvoir mengenai kehamilan yang sangat mengalienasi kebanyakan perempuan hamil, yang mempunyai pandangan positif atas “tubuhnya yang membesar karena berisi bayi.” Kita tidak dapat membuat orang menjadi feminis dengan pernyataan bahwa perempuan hamil adalah sejenis dengan sayuran.

Akhirnya, Elshtain mengkritik Beauvoir yang dianggapnya merayakan norma laki-laki pada umumnya. Semua keluhan Beauvoir mengenai karakter perempuan sebagai pasif, submisif, imanen, dimaknai sebagai perayaan karakter laki-laki sebagai aktif, dominan, dan transeden. Perendahan tubuh perempuan ini muncul sebagai akibat dari ditinggi-tinggikannya pikiran laki-laki. Pandangan yang merendahkan hubungan perempuan dengan alam sangat kontras dengan kekaguman akan konstruksi laki-laki terhadap kebudayaan. Karena itu, saran Beauvoir bagi pencapaian kebebasan perempuan adalah dengan menolak tubuhnya dan hubungannya dengan alam. Menurut Elshtain, saran Beauvoir dengan mengopresi perempuan adalah salah, serta meminta perempuan untuk menghilangkan identitas perempuannya tanpa mempertimbangkan konsekuensi yang harus dipertaruhkan perempuan, yaitu persaudaraan (*sisterhood*) untuk memperoleh persaudaraan laki-laki (*brotherhood*), menurut Elshtain, adalah tidak bertanggungjawab.

Para kritikus Beauvoir mengundang kita untuk memikirkan apakah lebih membebaskan untuk berpandangan bahwa perempuan adalah produk dari konstruksi kebudayaan, atau sebaliknya, memandang perempuan sebagai hasil dari pengaturan alamiah. Para kritikus itu juga mengundang kita untuk berpikir apakah wahana transendensi lebih baik, lebih buruk, atau hanya berbeda semata dari wahana imanensi. Akhirnya, para kritikus itu mengundang kita untuk mempertimbangkan apakah pembebasan perempuan mengharuskan perempuan

untuk menolak “yang feminin” sama sekali atau untuk merangkulnya dengan lebih erat (Elshtain, 1981 dalam Tong, 1998).

Dengan berjalannya waktu akhirnya partisipasi perempuan dalam kehidupan politik mulai mendapatkan perhatian yang cukup besar di seluruh dunia setelah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengeluarkan *Universal Declaration of Human Rights* pada tahun 1949, yang menjamin hak asasi manusia dan kebebasan fundamental seluruh umat manusia, laki-laki dan perempuan. Isu politik perempuan ini muncul sebagai tanggapan dan hasil dari perjuangan *Women Liberation Movement* (WLM) yang dimulai pada dekade 1960-an di Barat.

Pada dekade 1980-an WLM menjadi gerakan perjuangan berskala besar sampai meluas ke Dunia Ketiga dan Negara Sosialis Eropa Timur. WLM menandai kemajuan yang sangat nyata dalam mobilisasi politik dan integrasi politik perempuan, sehingga *mainstream* ini tidak dapat diabaikan lagi oleh para elit politik. Perubahan jelas kelihatan dalam pemberian suara, aktivisme dalam politik, seperti ikut berpartisipasi dalam partai politik, LSM, penyusunan agenda politik, formulasi politik, dan berbagai organisasi politik. Satu hal lagi, yang tak bisa dipungkiri adalah kesadaran politik perempuan yang semakin meningkat.

Selanjutnya PBB mengadopsi *Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW/Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Kaum Perempuan) pada 1979 dan Indonesia telah meratifikasi Konvensi Perempuan tersebut melalui Undang-Undang No. 7/1984. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Konvensi Hak-Hak Politik Perempuan melalui Undang-Undang No. 68 tahun 1958. Walaupun sudah ada jaminan atas partisipasi penuh perempuan dalam domain politik, yang tertuang dalam konvensi atau konstitusi, namun dalam kenyataan sehari-hari, hak-hak perempuan tidak sepenuhnya dipenuhi

dan kadang upaya-upaya untuk mendapatkan hak tersebut harus dilakukan dengan perjuangan yang berat.

Sebagai sebuah gerakan praktis untuk mengubah keadaan kaum perempuan, feminisme didominasi oleh para tokoh feminis liberal, yang pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 banyak memperbaiki keadaan perempuan, terutama dengan menghapus beberapa peraturan hukum yang cacat, diberikannya pendidikan dan pekerjaan yang layak, dan terutama, hak untuk memberikan suara dalam pemilu. Misalnya, Selandia Baru adalah negara modern pertama yang mengakui hak suara perempuan sejak 1893. Perempuan Inggris berusia di atas tiga puluh tahun mendapatkan hak untuk memberikan suara pertama kali tahun 1918, sementara semua perempuan Amerika memberikan suara untuk pertama kalinya tahun 1920 (meskipun beberapa negara bagian telah menerapkan hak ini terlebih dulu).

Setelah hak-hak ini diakui secara tetap, feminisme sebagai sebuah gerakan yang aktif mulai mengalami masa kemandekan, seolah-olah apa yang telah dicapainya harus dialami, dicerna, dan dievaluasi. Masih ada sebagian perempuan yang, melalui tindakan dan tulisan mereka, menantang norma-norma yang berlaku. Meskipun demikian, feminisme sebagai sebuah gerakan kemudian menyusut hanya menjadi perhatian segelintir orang. Tapi pembicaraan di kalangan intelektual tetap berlanjut dan semakin berkembang setelah Perang Dunia I (Wollstonecraft dalam Adams, 1993, 2004:388).

Sudah ada kesetaraan formal bagi kaum perempuan, dari tahun 1950-an hingga 1960-an kesetaraan ini terus semakin meningkat di Barat, namun masih ada kekecewaan. Di satu sisi, nasib perempuan telah mengalami perbaikan, tapi di pihak lain, dalam realitasnya dunia semakin dikuasai kaum laki-laki. Di samping itu, kaum perempuan juga mengalami diskriminasi di hampir semua aspek kehidupan di masyarakat. Ada dua orang penulis yang secara khusus mengartikulasikan perasaan ini dan buku

mereka menjadi pijakan imajinasi dari sebuah generasi kaum perempuan.

Selanjutnya Betty Friedan (1974) dalam bukunya *The Feminine Mystique*, sebuah buku Filsafat Kontemporer, memiliki makna yang cukup penting dalam mengubah arah dan memperkuat feminisme liberal, serta feminisme eksistensial Beauvoir. Buku ini secara tegas menolak asumsi yang diterima begitu saja bahwa perempuan adalah makhluk yang berbeda, memiliki karakteristik dasar yang sangat cocok untuk mengurus persoalan rumah tangga, dan hanya membutuhkan kesetaraan status formal. Friedman menegaskan bahwa pandangan ini tidaklah tepat. Ia menegaskan bahwa perbedaan, yang disimbolkan dalam apa yang disebut "*feminine mystique*", telah dinilai terlalu tinggi. Apa yang sebenarnya diinginkan perempuan adalah keluar ke dunia luas, berkiprah dalam berbagai kegiatan dan membangun karir dan berkompetisi secara setara dengan kaum laki-laki.

b. Feminisme Gelombang Kedua: Pembebasan Wanita

Feminisme gelombang kedua pada akhir dekade 1960-an dan awal 1970-an ditandai oleh kehadiran *Women Liberation Movements* yang kemudian dikenal sebagai gerakan feminisme radikal kultural dan radikal libertarian dengan pelopornya Kate Millet (1970 yang dikutip Tong, 1998) dalam bukunya *Sexual Politics*. Millet mengatakan bahwa seks adalah politis, terutama karena hubungan laki-laki dan perempuan merupakan paradigma dari semua hubungan *kekuasaan*: "Kasta sosial mendahului semua bentuk inegalitarianisme: ras, politik, ekonomi dan jika penerimaan terhadap supremasi laki-laki sebagai hak sejak lahir tidak dihilangkan, semua sistem operasi akan terus berlangsung hanya atas mandat logis dan emosional dalam situasi manusia yang primer."

Kendali laki-laki di dunia publik dan privat menimbulkan patriarki, sehingga penguasaan oleh laki-laki harus

dihapuskan jika perempuan ingin mendapat kebebasan. Tetapi ini bukanlah tugas yang mudah. Untuk menghilangkan penguasaan oleh laki-laki, perempuan dan laki-laki harus menghapuskan jender—terutama status, peran, dan temperamen seksual—sebagaimana hal ini dibangun di bawah patriarki.

Selanjutnya masih menurut Millet, ideologi patriarkal, membesar-besarkan perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan, dan memastikan bahwa laki-laki selalu mempunyai peran yang maskulin dan dominan, sedangkan perempuan selalu mempunyai peran yang subordinat, atau feminin. Ideologi ini begitu kuat, hingga laki-laki biasanya mampu mendapatkan persetujuan dari perempuan yang mereka opresi. Mereka melakukan hal tersebut melalui institusi akademi, gereja, dan keluarga, yang masing-masingnya membenarkan dan menegaskan subordinasi perempuan terhadap laki-laki, yang berakibat bagi kebanyakan perempuan untuk menginternalisasi rasa inferioritas diri terhadap laki-laki.

Gerakan feminisme ini dicirikan dengan dua hal pokok: (1) tuntutan akan demokrasi yang bersifat partisipatoris, yaitu demokrasi yang melibatkan seluruh rakyat, dan *the personal is political*; dan (2) melihat persoalan-persoalan mendasar yang saling berlawanan antara laki-laki dan perempuan. Secara khusus feminisme radikal ini ditandai dengan diskusi dan aksi politik di seputar isu-isu reproduksi (aborsi, kontrasepsi) dan kekerasan (perkosaan, penyalahgunaan seksual) (Pascal, 1986).

Pemberi karakteristik pikiran baru, yang secara luas dipengaruhi oleh spektrum feminis Millet. Seperti banyak teori Pembebasan Perempuan awal, teori ini banyak dipengaruhi oleh ide-ide Kiri Baru dengan gagasannya tentang dominasi, represi, dan alienasi, serta penggunaan konsep psikoanalitik. Meskipun demikian, masalah yang dikemukakan dan disimpulkan oleh Millet memantul jauh ke

luar politik radikal. Millet sekadar bertanya mengapa di dalam sebuah masyarakat yang bebas, di mana kaum perempuan memiliki hak-hak politik dan sipil yang lengkap, serta segala kesempatan pendidikan yang terbuka lebar, semua keputusan penting dalam masyarakat hanya dibuat oleh kaum laki-laki tanpa melibatkan kaum perempuan. Mengapa kaum perempuan harus mendapatkan peran subordinat dari kaum laki-laki?

Millet juga mengembangkan gagasan tentang “politik seks” (*The personal is political*) dengan menyatakan bahwa dalam hubungan yang paling pribadi antara lelaki dan perempuan, laki-lakilah yang mengontrol hubungan seksual, mengambil inisiatif, membatasi dan mendefinisikan seksualitas perempuan sesuai dengan kebutuhan mereka, serta membiarkan perempuan sering tak terpenuhi kebutuhan seksnya. Hal ini dianggap “politik” dalam artian bahwa hubungan seksual merupakan relasi kekuasaan, hubungan dominasi dan subordinasi, sebuah dimensi dari situasi di mana pihak yang *subordinate* hidup untuk melayani pihak yang dominan (*superordinate*). Dengan kata lain, hal ini merupakan dimensi patriarki. Ini adalah sumber slogan feminis “*The Personal is the Political* (Setiap Pribadi adalah Politis)” (Adam, 1993, 2004). Millet menekankan, bahwa meskipun ada usaha terus-menerus untuk mengkondisikan dan mengkoersi semua perempuan, banyak perempuan terbukti tidak dapat dikendalikan.

c. Feminisme Gelombang Ketiga: Identitas Politik

Feminisme gelombang ketiga, awal 1980-an sampai awal 1990-an, ditandai oleh pemahaman atas gerakan feminisme yang semakin beragam. Di mana gerakan politik sudah mengedepankan politik perempuan, ras etnisitas, dan posisi subjek yang sering dipahami dalam rubrik “politik *postmodern*”. Di mana segala sesuatu yang selama ini dimarjinalkan dan terpinggirkan, dalam “teori *postmodern*” spesifikasi posisi mereka mulai ditonjolkan; dengan

menghargai perbedaan mereka dari kelompok dan individu lain.

Teori politik ini mencirikan “politik identitas” (*politics of identity*) dan “politik perbedaan” (*politics of difference*). Politik ini timbul dalam pengelompokan politik baru, dari kategori yang telah diabaikan pada zaman modern seperti ras, jender, preferensi seksual, etnisitas, dan politik identitas.

Gaya konsep politik baru ini didasarkan pada konstruksi identitas politik dan identitas budaya melalui perjuangan politik dan komitmen politik. Memang ada perbedaan pendapat tentang masalah identitas ini seperti dikemukakan Best dan Kelner (1991), ketegangan ini bermula dari ambiguitas kata ‘identitas,’ yang berkonotasi negatif di dalam teori postmodern selama ini, karena ia mengimplikasikan logika identitas represif (dikaitkan dengan Hegel dan Marxisme) yang mereduksi heterogenitas menjadi homogenitas. Di samping itu, ‘identitas’ juga berkonotasi positif selama ini, karena ia melibatkan penempatan identitas politik, dari latar belakang sejarah dan budaya seseorang, dan jender, kelas, dan status etnis seseorang. Kedua sumber subjektivitas individu dan pengelompokan politik yang berlainan ini diistilahkan ‘posisi subjek’.

Dalam hal ini Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendeklarasikan tahun 1975-1985 sebagai Dasawarsa Perempuan, dan menginstruksikan kepada setiap negara anggotanya untuk memberikan perempuan kesempatan yang sama untuk kemajuan di bidang ekonomi, kebudayaan, agama, politik, dan hukum seperti yang dimiliki laki-laki. Diikuti tiga konferensi perempuan internasional menandai Dasawarsa Perempuan: konferensi awal dilakukan di Mexico City (1975); konferensi tengah dilakukan di Kopenhagen (1980), dan yang terakhir adalah konferensi 12 hari di Nairobi Kenya (1985). Lebih dari 2.000 delegasi dari 140 negara menghadiri pertemuan terakhir itu, termasuk Indonesia (Tong, 1998).

Kendati ada konflik nyata ikhwal isu identitas dan perbedaan dalam teori

kontemporer dan politik, namun ada kesesuaian atau kecocokan logika antara politik perbedaan dan politik identitas, karena politik identitas bisa “menekankan berbagai kekuatan” yang membentuk identitas politik dan pentingnya mengabsahkan serta memperkuat spesifisitas kelompok politik tersebut, seperti Laclau dan Mouffe (Foucault, Deleuze dan Guattary dalam Best dan Kelner, 1991), misalnya, mengedepankan pentingnya pluralitas politik, dengan penekanan yang banyak kita jumpai pada teoretisi postmodern lain, mereka juga menekankan pentingnya membentuk identitas politik, yang harus diartikulasikan di dalam aliansi politik radikal, namun radikalisme ini gagal, namun terartikulasikan dengan baik.

Sebenarnya, gerakan feminisme yang banyak berlangsung di dunia ini, telah menempatkan kembali perempuan dalam semangat emansipasi yang tinggi dengan aturan-aturan yang telah memberi tempat perempuan dalam ranah publik, di mana kaum laki-laki dan perempuan “berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah” yang selama beabad-abad termarjinalkan di setiap aktivitas kehidupan. Gerakan emansipasi ini memberikan inspirasi besar kepada organisasi perempuan di dunia, yang mempengaruhi organisasi perempuan untuk memperjuangkan hak-hak sosial dan hak politiknya tanpa harus mengurangi peran perempuan sesuai kodratnya. Dan peran politik perempuan dari satu periode perjuangan politik ke periode perjuangan politik berikutnya, memiliki tujuan yang berbeda disesuaikan dengan periode perjuangan itu sendiri karena setiap periode perjuangan punya karakteristik yang berlainan.

Pilihan Politik bagi Perempuan (*Political Self Selection*)

Tidak dapat dipungkiri bahwa sudah banyak perempuan di dunia saat ini yang sudah berkarier di segala bidang kehidupan sosial, apakah berkarier itu merupakan keharusan untuk menambah penghasilan keluarga yang tidak cukup,

ataukah merupakan pilihan dengan alasan-alasan lain.

Jika kita bandingkan perempuan yang bekerja di bidang lain dengan yang memasuki bidang politik, bidang politik lebih rendah. Dalam sebuah penelitian yang diadakan di Sumatera Barat mengenai

“Perempuan Minangkabau dalam Politik: suatu kajian mengenai hambatan dan usaha untuk mendapatkan kedudukan kepemimpinan politik” (Nurwani Idris, 2007), dapat dilihat bahwa masih kecil sekali jumlah perempuan yang memasuki politik.

Tabel 1. Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas yang Bekerja Menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin Tahun 2004

Tingkat Pendidikan (1)	Laki-laki (2)	Perempuan (3)	Jumlah (4)
1. Tidak/ Belum Pernah Sekolah	22.763	72.420	95.183
2. Tidak Belum Tamat SD	265.437	337.082	602.519
3. Sekolah Dasar	394.218	409.443	803.661
4. SMTP Umum	343.482	330.007	673.489
5. SMTA Umum	274.157	295.405	569.562
6. SMTA Kejuruan	87.424	65.796	153.220
7. Diploma I/ II	6.850	23.213	30.063
8. Akademi / Diploma III	20.889	26.853	47.742
9. Universitas (S1)	42.894	38.787	81.681
10. Strata-2 (S2)	3.091	980	4.071
Jumlah	1.461.205	1.599.986	3.061.191

Sumber : BPS, Hasil Survey Sosial Ekonomi Nasional, 2004.

Keterangan total: (a) Jumlah total perempuan yang bekerja terlihat lebih tinggi dari laki-laki. (b) Jumlah perempuan yang bekerja lulusan SD juga lebih banyak daripada laki-laki. (c) Yang lain rata-rata hampir sama, begitu juga yang berpendidikan sarjana, namun jumlah perempuan yang lulusan S2 (pascasarjana) lebih sedikit dari laki-laki.

Hampir tidak ada perbedaan dalam bidang pekerjaan berdasarkan pendidikan di Minangkabau antara perempuan dan laki-laki, yaitu jumlahnya hampir sama. Yang menarik, jumlah total perempuan yang bekerja lebih tinggi daripada laki-laki. Selanjutnya dari hasil perolehan suara dalam Pemilu Legislatif DPRD Kabupaten/ Kota Provinsi Sumatera Barat tahun 2004, dalam politik jumlah perempuan yang berpartisipasi masih sangat sedikit.

Di Kabupaten Agam ada 4 orang perempuan; Kabupaten Limapuluh Kota ada 4 orang perempuan, dan Kabupaten Tanah Datar hanya 3 orang perempuan, dan empat kabupaten tidak mempunyai anggota perempuan.

Sedangkan dari hasil perolehan suara dalam Pemilu Legislatif pemilihan anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat periode 2004-2009, hanya ada 5 perempuan yang menjadi anggota DPRD Provinsi. (Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat, 2004).

Di Minangkabau Sumatera Barat ditemukan banyak hal yang menyebabkan perempuan enggan memasuki dunia politik antara lain diperlukan motivasi politik yang tinggi yang dipengaruhi oleh hal-hal yang multikompleks.

Secara umum pengertian dari minat atau motivasi adalah rangsangan yang didapat dari lingkungan, yang sangat erat hubungannya dengan emosi atau perasaan seseorang, yang mengarah pada terciptanya

suatu kondisi yang menyebabkan hasrat atau kehendak untuk melakukan suatu tindakan dalam hal ini tindakan politik. Namun pada sebagian besar perempuan Minangkabau rangsangan dari lingkungan politik menyebabkan mereka tidak berminat pada politik.

Selanjutnya agar motivasi dapat timbul atau meningkat, kearah pencapaian kesadaran diri yang tinggi, sehingga dapat melakukan aktivitas dalam hal politik atau tindakan aktualisasi politik, Vroom (1964 dalam Huitt, 2001) mengajukan konsep sebagai berikut:

Motivasi = Persepsi Probabilitas Keberhasilan (Expectancy)*
 Hubungan antara Keberhasilan dan Reward (Instrumentality)*
 Nilai dari Mencapai Tujuan (Valance, Value).

Dengan demikian motivasi politik yang tinggi dapat meningkatkan kesadaran politik yang tinggi sehingga berusaha untuk mencapai hasil.

Crittenden (pengantar dalam Megawati, 1999) mengatakan bahwa, usaha perempuan untuk meraih kepemimpinan politik juga dipengaruhi oleh keterlibatan pemerintah dalam merekrut perempuan, misalnya perbaikan konstitusi, komitmen pemerintah yang tinggi untuk membantu menaikkan partisipasi perempuan dalam politik dengan aturan dan sanksi yang jelas serta fasilitas penitipan anak dan sebagainya.

Untuk mencapai tujuan kesuksesan dalam politik, dan partisipasi dalam politik dalam arti mengaktualisasikan diri dalam politik, seseorang perlu berusaha, belajar, menambah pengalaman, meningkatkan komunikasi dengan pihak terkait dan lingkungan dan seterusnya. Untuk dapat sukses dalam politik sehingga dapat menduduki posisi kepemimpinan politik, kemampuan internal sangat berpengaruh, dengan menambah kemampuan secara terus menerus, untuk dapat menembus hambatan.

Hambatan yang dihadapi untuk mendapatkan kedudukan politik dengan karier sosial yang lain memang lebih berat, dan lebih kompleks dan rumit, terdapat hambatan eksternal dan hambatan internal.

Hambatan eksternal adalah hambatan yang datang dari lingkungan publik, politik, sosial budaya yang tidak mendukung pemberdayaan perempuan dalam politik atau peluang bagi perempuan untuk mendapatkan kedudukan kepemimpinan politik, terdiri dari: (1) Hambatan budaya politik dan agama, terdiri dari: a) Pemarjinalan perempuan dari ranah publik, berupa: (1) Proses pemarjinalisasian telah dimulai sejak kolonialisme Belanda; (2) *Framing* atau pembingkai makna bagi masyarakat Minangkabau terhadap kebebasan perempuan; (3) Wacana ilmiah dan kekuasaan; (4) Program pemerintah oleh Orde Baru; (5) Perubahan kedudukan perempuan Minangkabau dalam masyarakat; b) Kompetensi; c) Sistem perekrutan; d) Aturan partai; e) Hambatan birokrasi; f) Hambatan ekonomi; g) Hambatan pendidikan; h) Hambatan agency.

Disimpulkan menjadi hambatan budaya politik dan agama yang diringkas ke dalam 4 (empat) faktor hambatan: (a) hambatan struktural, (b) hambatan budaya dan agama, (c) hambatan perantara (agency) atau *intermediate organization*, (d) hambatan kelembagaan (institusional).

Hambatan budaya dan agama, memang telah melonggar tetapi tetap mempengaruhi motivasi atau dorongan yang dapat membawa perempuan ke dalam urusan publik, seperti kewajiban terhadap rumah tangga dan anak-anak, sementara berpolitik sangat menyita waktu dan tenaga diikuti pula oleh kepercayaan kepada lembaga/ institusi yang sangat kurang.

Singkatnya, penjelasan-penjelasan di atas menyatakan bahwa perempuan Minangkabau menduduki posisi yang rendah dalam parlemen: (a) karena mereka tidak mampu (mereka tidak punya sumberdaya); (b) mereka tidak mau (mereka tidak tertarik); (c) tidak ada yang meminta mereka (tidak mempunyai

jaringan); atau (d) aturan (konstitusi) menghalangi mereka.

Dengan demikian, hambatan eksternal dapat dirumuskan: hambatan budaya politik dan agama, (a) hambatan struktural, (b) hambatan budaya dan agama, (c) hambatan perantara (*agency*) atau *intermediate organization*, (d) hambatan kelembagaan (institusional), yang mempengaruhi diri (*self*) perempuan, yakni keinginan, minat dan tindakan perempuan untuk mencalonkan diri dalam mendapatkan kedudukan kepemimpinan politik. (Nurwani, 2007).

Hambatan internal adalah faktor diri (*self*) yang menyebabkan perempuan kurang berminat pada politik, gagap memasuki dunia publik, sehingga daya juangnya rendah. (1) Keterlibatan atau aktivisme perempuan sangat terkait dengan kompetensi; minat, kemampuan, dan kesadaran politik perempuan dalam politik yang diiringi dengan memasuki jaringan sosial atau tingkat pendidikan yang lebih tinggi; (2) Keterlibatan (aktivisme) perempuan dipengaruhi oleh faktor struktural, budaya dan agama, *agency* (*intermediate organization*) dan konstitusi yang dirangkum dalam *hambatan budaya politik dan agama*, yang mempengaruhi diri (*self*) perempuan itu sendiri, yang membentuk *mind* perempuan itu. (3) Selanjutnya faktor diri (*self*) dipengaruhi juga oleh: (a) anggapan dan sikap terhadap politik siapa yang menjadi pemimpin tidak begitu penting; (b) ditambah lagi dengan perasaan perempuan yang menganggap bahwa politik itu hanya permainan kekuasaan yang sering diikuti dengan permainan kotor, politik uang, dan sebagainya; sementara laki-laki menganggap politik itu penting dan mempercayai lembaga-lembaga politik; (4) Sebenarnya semua *resources* untuk perempuan terjun dalam politik telah tersedia dengan cukup, namun perempuan masih terpengaruh oleh pemikiran bahwa politik itu bukan dunia mereka, bagi mereka siapa yang memimpin tidak begitu penting, asalkan hidup dalam harmoni. (Nurwani, 2007).

KESIMPULAN

Sebenarnya, gerakan feminisme yang banyak berlangsung di dunia ini, telah menempatkan kembali perempuan dalam semangat emansipasi yang tinggi seperti di Minangkabau dengan aturan-aturan yang telah memberi tempat perempuan Minangkabau dalam ranah publik, di mana kaum laki-laki dan perempuan “berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah” yang selama beabad-abad termarginalkan di setiap aktivitas kehidupan. Gerakan emansipasi ini memberikan inspirasi besar kepada organisasi perempuan di dunia, yang mempengaruhi organisasi perempuan di Indonesia dan Minangkabau, dan perempuan-perempuan dari suku lainnya di Indonesia, untuk memperjuangkan hak-hak sosial dan hak politiknya tanpa harus mengurangi peran perempuan sesuai kodratnya. Dan peran politik perempuan Indonesia pada umumnya dan perempuan Minangkabau pada khususnya, dari satu periode perjuangan politik ke periode perjuangan politik berikutnya, memiliki tujuan yang berbeda disesuaikan dengan periode perjuangan itu sendiri karena setiap periode perjuangan punya karakteristik yang berlainan, untuk memasuki dunia politik ternyata jauh berbeda dari berkarier di bidang lain, bidang politik banyak hambatan yang harus dihadapi.

Walaupun tidak ada lagi aturan formal yang menghalangi namun jalan untuk menuju dan mendapatkan kedudukan politik sangat kompleks. Sejauh ini terbukti bahwa budaya dan agama memang berpengaruh, tetapi telah mulai melonggar, jika dibandingkan dengan faktor budaya politik dan faktor sosial serta institusional lainnya yang terkait dengan kesetaraan perempuan dalam politik. Seperti pentingnya status pekerjaan, pendidikan, dan sosioekonomi perempuan tersebut; sumber daya finansial, pengalaman, dan jaringan sosial yang memudahkan pencalonan untuk menduduki jabatan tersebut. (Nurwani, 2007:329).

Begitu juga hambatan budaya dan agama saat ini sudah melonggar namun disamping aturan permainan politik, seperti aturan dan permainan partai politik yang terdapat dalam budaya politik pada saat ini menjadi fenomena yang penting dalam mendapatkan kedudukan politik.

Untuk memasuki dunia politik sangat tergantung pada *political self selection* perempuan itu sendiri. Dalam hal untuk mengambil tindakan politik, tulisan ini merujuk pendapat Talcott Parsons (1951 yang dikutip oleh Hambermas, 2007) dalam teori struktural-fungsionalnya bahwa masyarakat bertindak didorong oleh pemahaman kultural yang diyakini, dan berdasarkan pemahaman itu, yakni nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku sebagai tujuan dan mengikat para aktor secara intersubjektif, serta nilai-nilai dan norma itu menjadi motif (dorongan pribadi) untuk bertindak dan pembentuk karakter manusia bersama terjadinya internalisasi, dalam arti manusia dalam mengambil keputusan untuk melakukan sesuatu, norma dan nilai yang diyakini menjadi dorongan untuk bertindak (Nurwani, 2007).

Kajian tulisan ini sependapat dengan Parsons yang menyatakan bahwa: tindakan tersebut dapat menjadi saluran di mana nilai-nilai kultural bergeser menjadi tindakan yang didorong oleh motivasi: “sistem sosial adalah sistem tindakan yang didorong oleh motivasi yang mengatur hubungan aktor dengan sesamanya: kepribadian adalah sistem tindakan yang didorong oleh motivasi yang mengatur organisme hidup.” (Nurwani, 2007).

Untuk memasuki dunia politik adalah merupakan pilihan politik (*political self selection*) suatu konsep tentang usaha politik atau gerakan untuk mencapai kedudukan dalam politik adalah kerja keras, tidak bisa hanya menunggu dari alam “*given*” tetapi harus diraih “*taken*”, dengan kata lain usaha dalam mendapatkan kedudukan kepemimpinan politik adalah perjuangan menentang gejala rasa rendah diri dan menakutkan rintangan yang ada.

Sebagai suatu konsep perjuangan perempuan dalam politik perlu dikaji lebih

lanjut oleh feminisme bahwa fenomena perempuan dalam politik terdapat dalam kebebasan yang telah dipunyai, peluang yang ada, dengan suatu tindakan strategis dalam memanfaatkan peluang tersebut yakni S.W.O.T (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, dan Threats*).

DAFTAR PUSTAKA

- Adams, Ian. 1993. Ideologi Politik Mutakhir: Konsep, Ragam, Kritik, dan Masa Depan, Yogyakarta: Qalam.
- Bennion, Elizabeth Anne. 2001. Gender Perception, and Policy Priorities in Three Midwestern State Legislatures, Dissertation, University of Wisconsin–Madison.
- Best, Steven and Kellner, Douglas. 1991. Postmodern Theory: Critical Interrogations, London: Macmillan Education LTD.
- de Beauvoir, Simon. 2003. Second Sex: Kehidupan Perempuan, Cetakan pertama, Penerjemah: Toni B. Febriantono, dkk. Penerbit: Pustaka Prometheus.
- Etty, Maria. 2004. Perempuan: Memutus Mata Rantau Asimetri, Jakarta: PT. Grasindo.
- Friedan, Betty. 1974. The Feminine Mystique. New York: Dell.
- Habermas, Jürgen. 2007. Teori Tindakan Komunikatif II: Kritik atas Rasio Fungsionalis, Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Huitt, W. 2001. Motivation to Learn: An Overview, Educational Psychology Interactive. Valdosta, GA: Valdosta State University. (<http://chiron.valdosta.edu/whuitt/col/motivation/motivate.html>)
- Idris, Nurwani. 2007. Perempuan Minangkabau dalam Politik: Suatu kajian mengenai hambatan dan usaha untuk mendapatkan kedudukan kepemimpinan politik, Disertasi Program Doktor Program Studi Ilmu Sosial Universitas

- Airlangga Surabaya, Surabaya: Airlangga Press.
- International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA). 2002. *Perempuan di Parlemen: Bukan Sekedar Jumlah*, Edisi Bahasa Indonesia, Sweden: International IDEA, SE-103 34 Stockholm.
(http://www.idea.int/publications/wip/upload/full_version.pdf)
- Losco, Joseph. 2005. *Political Theory, Kajian Klasik dan Kontemporer*, Volume I, Joseph Losco, dan Leonard Williams, penerjemah, Haris Munandar, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Losco, Joseph. 2005. *Political Theory, Kajian Klasik dan Kontemporer*, Volume II, Joseph Losco, dan Leonard Williams, penerjemah, Haris Munandar, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Matullesy, Andik. 2005. *Psikologi Politik*, Cetakan pertama, Surabaya: Penerbit Srikandi.
- Megawangi, Ratna. 1999. *Pengantar Penerbit dalam: Wanita Salah Langkah*, oleh Danielle Crittenden, Bandung: Qanita.
- Pascal, Gillian. 1986. *Social Policy, A Feminist Analysis*. London and New York: Tavistock Publication Ltd.
- Tong, Rosemarie Putnam. 1998. *Feminist Thought: Pengantar Paling Komprehensif kepada Aliran Utama Pemikiran Feminis*, Penerjemah, Aquarini Priyatna Prabasmoro, Yogyakarta: Jalasutra.